BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada pemerintahan negara Indonesia yang saat ini sedang berusaha kuat dalam membangun berbagai segi kehidupan. Menurut Anwar (2014) “Pembangunan yang digiatkan pemerintah pada saat ini bisa diartikan sebagai bentuk ganantigasan untuk mengimplementasikan sesuatu yang diharapkan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa”.

Menurut Pratikno (2008) dikatakan bahwa “Negara Republik Indonesia sekarang ini melakukan sistem otonomi dan desentralisasi fiskal, dengan demikian proses pemekaran wilayah terjadi di daerah dengan level setingkat provinsi maupun daerah setingkat kabupaten atau kota. Terhitung semenjak bulan Oktober 1999 sampai bulan Januari 2008 telah tercipta 7 provinsi baru, dan 134 daerah kabupaten maupun kota baru yang tercipta dari proses pemekaran wilayah. Selanjutnya pemekaran wilayah terus berlangsung, hingga tahun 2019 total provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Hal tersebut terjadi dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah”

“Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan kepada tingkatan – tingkatan organisasi lebih rendah” hal tersebut dikutip dari Handoko (2003:229). Begitu pula menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dijelaskan juga pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Pemekaran wilayah adalah metode pemecahan wilayah yang menggabungkan beberapa wilayah, yang bertujuan untuk memajukan pelayanan serta memaksimalkan pembangunan. Dalam mekanisme pemekaran wilayah, wilayah tersebut diinginkan untuk menciptakan kemandirian daerah yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dengan cara meningkatkan kualitas serta kemudahan bagi masyarakat. Dikutip dari Effendy (2008) bahwa “Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan”.

Hakekat pemekaran wilayah menurut Lovita (2017) ialah “tindakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Secara

fundamental proses desentralisasi terdiri dari dua komponen penting yaitu penciptaan daerah otonomi baru (DOB) dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani tugas yang diberikan pemerintah pusat secara hukum.”

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah menerbitkan suatu kebijakan melalui Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang telah diperbaiki dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 serta Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa “daerah dianugerahkan hak serta wewenang berdasarkan dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dan mempunyai hak untuk mengatur semua kewenangannya”. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 mengurus pelaksanaan pemerintahan daerah serta penerapan desentralisasi. Dibawah ini merupakan jumlah provinsi maupun kabupaten/kota pasca pemekaran mulai tahun 1950 sampai 2022.

Tabel 1. Pertambahan Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 1950 - 2022

No	Tahun	Provinsi	Pemekaran Provinsi	Kabupaten/Kota	Kabupaten Kota
1	1950 – 1955	4	-	99	-
2	1956 – 1960	20	16	244	145
3	1961 – 1965	24	4	260	16
4	1966 – 1970	26	2	271	11
5	1971 – 1998	26	-	304	33
6	1999 – 2005	33	7	440	136
7	2006 – 2022	38	5	514	33

Sumber: BPS Indonesia (Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 1 dampak dari pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 ialah terjadinya pemekaran 7 provinsi serta 136 kabupaten maupun kota. Lalu terjadi lagi pemekaran sebanyak 5 provinsi dan 33 kabupaten/kota dalam rentang waktu 2006 hingga 2022, dengan demikian jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38 dan jumlah kabupaten/kota menjadi 514. Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pemekaran. Berikut merupakan daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara pra dan pasca diberlakukan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pasca lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemekaran wilayah banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 33 kabupaten/kota pasca disahkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebelumnya jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara berjumlah 17 kabupaten atau kota. Olehkarena itu dengan disahkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004, tercipta 16 kabupaten atau kota baru. Salah satu dari hasil dari pemekaran wilayah tersebut ialah Kota Gunungsitoli yang mekar dari wilayah Kabupaten Nias.

Tabel 2. Banyaknya Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Pra dan Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pra Ditetapkan UU No. 22.1999	Pasca Ditetapkan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004
Kabupaten Nias	Kabupaten Nias Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kota Padang Sidempuan
Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Kabupaten Samosir
Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang Kota Medan Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara
Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun
Kabupaten Karo	Kabupaten Karo
Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat
Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
Kota Binjai	Kota Binjai
Kota Sibolga	Kota Sibolga
Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar
Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten Mandailing Natal
Total: 17 Kabupaten/Kota	Total: 33 Kabupaten/Kota

Sumber: Rekapitan dari BPS Sumatera Utara (Tahun 2018)

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah yang mekar pasca disahkan Undang Undang Nomo 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan UU No. 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Pemekaran Kota Gunungsitoli disahkan pada tanggal 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Kabupaten Nias sendiri terdiri atas 10 Kecamatan, yakni Kec. Idanogawo, Kec. Bawolato, Kec. Ulugawo, Kec. Gido, Kec. Sogaeadu, Kec. Mau, Kec. Somolo-molo, Kec. Hiliduhu, Kec. Hiliserangkai, dan Kec. Batomuzoi.

Menurut Andi (2004) “pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan”. Tujuan utama dari pemekaran wilayah ialah untuk memakmurkan penduduk yang tinggal pada suatu daerah, agar dapat mengurangi ketertinggalanya sehingga dapat setara terhadap daerah lainnya. Dengan terjadinya pemekaran wilayah masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang membaik, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah agar kesejahteraan yang diharapkan tersebut dapat tercapai.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan

anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Kesejahteraan masyarakat adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa indikator, Badan Pusat Statistik Indonesia mengukur pembangunan manusia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat (<https://www.bps.go.id>). Menurut (Roekminiati: 2014) pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam hal ini, pembangunan ditunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan dengan demikian maka pembangunan manusia menjadi tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar mampu menjadi subyek pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor tingkat kesejahteraan masyarakat adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Adapun variabel yang digunakan dalam menghitung IPM ialah Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran. Oleh karena itu IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung kesejahteraan yang didasarkan oleh indikator kesejahteraan BPS

Peningkatan pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat melalui tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek pengeluaran perkapita menyebutkan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan melalui harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nias pada tahun 2017 diketahui dengan nilai 60,21 dan masih tergolong sedang, hanya berbeda 0,21 dari kategori rendah. Lalu angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Nias pada tahun 2020 hanya sebesar 5,36 berbanding jauh dengan rata – rata lama sekolah provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 9,58. Lalu jumlah rumah permanen yang terdapat di Kabupaten Nias pada tahun 2021 hanya sebesar 32,11% berbanding jauh dengan rata – rata provinsi Sumatera Utara yakni 68,95%. Selain rendahnya tingkat keadaan rumah, tingkat fasilitas tempat tinggal, salah satu komponen fasilitas tempat tinggal ialah jarak tempat tinggal ke sumber air minum layak, yakni hanya sebesar 51,59%. Lalu keadaan Selain tingkat kesejahteraan masyarakat, perkembangan sarana prasarana merupakan salah satu dampak dari pemekaran wilayah. Per tahun 2018 jumlah SMA di Kabupaten Nias hanya berjumlah 10 sekolah saja, dan pertahun 2020 Kabupaten Nias belum memiliki sama sekali rumah sakit umum, dan hanya memiliki 7 Puskesmas dengan layanan rawat inap.

Tabel 3. Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Nias Tahun 2009 - 2016

No	Tahun	Jenis Sarana Prasarana							
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	RS	Puskesmas	Pustu
1	2009	8	143	27	6	9	1	8	28
2	2010	8	143	27	6	9	1	8	28
3	2011	11	143	35	6	9	1	8	28
4	2012	11	147	46	6	14	1	9	28
5	2013	11	151	47	6	14	1	10	28
6	2014	10	150	47	7	14	1	10	28
7	2015	10	154	48	7	14	1	10	28
8	2016	11	161	49	10	16	1	10	28

Sumber: Kabupten Nias Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel 3, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait kesejahteraan Masyarakat pasca pemekaran yang terjadi di Kabupaten Nias pada tahun 2017 – 2022.

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah yang telah dibahas, oleh karena itu terdapat beberapa identifikasi masalah yang perlu di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya nilai IPM Kabupaten Nias pasca pemekaran dibanding daerah yang dimekarkan yakni Kota Gunungsitoli.
2. Rendahnya perkembangan sarana prasarana di Kabupaten Nias pasca pemekaran dibanding wilayah yang dimekarkan yakni Kota Gunungsitoli.
3. Rendahnya tingkat keadaan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Nias pasca Pemekaran.
4. Rendahnya tingkat fasilitas tempat tinggal Masyarakat di Kabupaten Nias

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah hanya difokuskan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias pada tahun 2017 – 2022, dan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan ialah Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan, dengan variabel yakni : Angka Harapan Hidup, Angka rata – rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan angka pengeluaran. begitu juga dengan saran prasarana yang diteliti yakni sarana prasarana pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang terjadi di Kabupaten Nias pada tahun 2017 – 2022, merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias, dan akan berdampak langsung terhadap perkembangan saran prasaran di Kabupaten Nias.

D. Rumusan Masalah

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut ialah:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran di Kabupaten Nias tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana tingkat perkembangan sarana prasarana pasca pemekaran di Kabupaten Nias tahun 2017 – 2022?

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran di Kabupaten Nias tahun 2017 - 2022
2. Menganalisis tingkat perkembangan sarana prasarana pasca pemekaran di Kabupaten Nias tahun 2017 – 2022

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

1. Memberikan pengetahuan bahwa kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Nias dipengaruhi oleh pemekaran wilayah yang terjadi.
2. Menjadi sumber edukasi penelitian yang membahas tentang otonomi daerah serta pemekaran wilayah.

b. Manfaat praktis:

1. Menambah edukasi bagi peneliti tentang pengaruh pemekaran wilayah.
2. Dapat menjadi bantuan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan pada bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.